

DAFTAR BACAAN

- Hajati, Sri, “Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan Agraria”, *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar*, Universitas Airlangga, Surabaya, 5 Maret 2005.
- Harsono, Boedi, “Aspek Yuridis Penyediaan Tanah”, *Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN*, Nomor 2 Tahun XX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 1980.
- , *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hutagalung, Arie S, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- , *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka – Karunika, Jakarta, 1988.
- Parlindungan, A.P., *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- , *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- , “Beberapa Konsep Tentang Hak-hak Atas Tanah”, *Majalah CSIS*, Tahun XX No. 2, Jakarta, Maret – April 1991.
- , *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Santoso, Urip, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2011.
- , *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.

-----, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

-----, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.

Sumanto, Listyowati, “Ruislag, Hak Atas tanah Aset Negara, *Majalah HUKUM TRISAKTI*, Nomor 27 Tahun XXII, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Juli 1997.

Sumardjono, Maria S.W., “Hak Pengelolaan : Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya”, *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Tanawijaya, Hanafi, “Eksistensi Lembaga Ruislag di Indonesia, *Jurnal ERA HUKUM*, Nomor 4 Tahun 6, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, April 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, LNRI Tahun 1960 No. 104 – TLNRI No. 2043.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, LNRI Tahun 2000 No.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah*, LNRI Tahun 1996 No.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*, LNRI Tahun 1997 No.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, LNRI Tahun 1998 No.

Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang *Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan*, LNRI Tahun 2000 No.

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang ***Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah***, LNRI Tahun 2014 No.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang ***Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah***.
- Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang ***Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya***.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ***Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah***.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang ***Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan***.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang ***Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah***.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006 tentang ***Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah***.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2013 tentang ***Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah***.